



## Sekda Minta SKPD Tuntaskan Masalah Aset

**Dari 1.395  
Aset Tanah,  
Baru 245  
Bersertifikat**

**PUTUSSIBAU**—Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Sukri meminta seluruh pimpinan SKPD segera menuntaskan persoalan aset daerah di masing-masing SKPD. Instruksi tersebut disampaikan, mengingat dari 1.395 aset berupa tanah yang diakui dan dicatat Pemkab Kapuas Hulu, baru 245 telah bersertifikat. Sementara 1.150 hingga kini nilai asetnya tersebut masih nol.

Sebagian besar aset itu berada di tiga instansi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pertanian dan sekretariat daerah. Dan umumnya aset yang masih bermasalah berada di kecamatan dan desa. "Dalam Rekonsiliasi Juni lalu, camat diminta mengurus SKT seluruh aset daerah berupa tanah di daerahnya. Namun sampai hari ini hanya bunut hilir

yang melaksanakannya," terang Sukri.

Akibatnya, sebagian besar aset daerah yang berada di kecamatan belum genah dan nilainya menurut BPK masih nol. Untuk itu seluruh pimpinan SKPD diminta segera menuntaskan pendataan asetnya di setiap kecamatan. Seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan yang merupakan salah satu SKPD yang banyak memiliki aset di kecamatan berupa pustu, polindes, puskesmas dan sekolah-sekolah. "Pak Bupati sudah berulang kali mengingatkan agar masalah aset ini segera di selesaikan dengan serius sebelum masa jabatan beliau berakhir. Namun kenyataannya dari 23 kecamatan, hanya bunut hilir yang sudah mulai membuat SKT aset tanah, 22 kecamatan lainnya belum. Untuk itu, waktu yang tersisa satu bulan lebih ini, SKPD turun langsung, jangan menunggu dari kecamatan lagi," tegas Sukri.

Sementara itu, Kepala DP-PKAD, H.M Zaini mengatakan, banyak permasalahan aset di setiap SKPD mesti diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah aset tersebut, baik berupa ban-

gunaan, tanah maupun kendaraan, pihaknya sudah melakukan rekonsiliasi aset daerah dengan mengundang seluruh SKPD dan camat serta desa. Namun hingga kini masih banyak yang belum menyelesaikannya.

"Empat bulan lalu kami sudah meminta seluruh SKPD melakukan pembenahan dan menyelesaikan permasalahan aset di SKPD masing-masing. Namun kenyataannya hingga hari ini masih banyak yang SKPD yang belum melakukan dan menyelesaikan persoalan aset. Kami tak bisa berbuat banyak, kami mengkoordinir saja, yang bertanggungjawab dan berwenang adalah masing-masing SKPD," jelasnya.

Dikatakan Zaini, jika masih ada aset daerah bernilai nol atau satu, maka predikat WTP dari BPK tak akan bisa di raih kapuas hulu. Untuk di harapkan waktu yang masih tersisa satu bulan lebih ini bisa di gunakan sebaik-baiknya oleh masing-masing SKPD untuk menyelesaikan masalah asetnya. "Jika persoalan aset tuntas, saya optimis kapuas hulu bisa meraih predikat WTP dari BPK," paparnya. (aan)